

DAFTAR ISI

COVER.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR BAGAN.....	XII
PRAKATA.....	XIV
ABSTRAK.....	XVII
ABSTRACT.....	XIX
BAGIAN I.....	1
BAB 1 CARA BEROTONOMI YANG AMAN BAGI LINGKUNGAN HIDUP	2
A. Mengkerangkai Ulang <i>Policy-Making</i> : Sisi terlewatkan Dalam Studi Otonomi Daerah di Indonesia.....	4
B. Mewacanakan Pembangunan Berwawasan Lingkungan: Menyoal Keseksamaan Bingkai dalam Berotonomi.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan, Kontribusi dan Keterbatasan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pengkajian: erotonomi Daerah Dengan Ketegasan Misi Tranformatif.....	16
1. Berotonomi: Mengelola Proses Transformasi.....	17

2. Dalam Berotonomi, Daerah Memerlukan Kejelasan <i>Framework</i> .	21
3. Merunut Konsistensi dalam Menjabarkan <i>Framework</i> : Belajar Dari Instrumentasi Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang.....	34
a. Kehati-hatian dalam Mencermati dan Menghormati Batas-batas Daya Dukung Lingkungan.....	35
b. Melacak Instrumentasi Daya Dukung Lingkungan.....	41
E. Metode Penelitian.....	46
F. Sistematika Disertasi.....	51
 BAGIAN KEDUA.....	 53
 BAB 2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERWACANAAN DAN INSTALASI KEPEDULIAN.....	 54
A. Penegasan Advokasi Perubahan Nilai.....	55
B. Artikulasi Tuntutan Perubahan: Pembangunanlah yang Bermasalah, Bukan Lingkungan Hidup.....	60
C. Menyiapkan Rute Transformasi <i>Policy-Making</i>	65
1. Wacana Modernisasi Ekologi.....	66
2. Wacana Eko-Efisiensi.....	68
D. Refleksi: Aktualisasinya Perwacanaan Sebagai Ethos.....	70
 BAB 3 MENAWAR PEMBANGUNANISME: KAPASITAS SUBVERSIF WACANA EKOLOGIS.....	 74
A. Otonomi Daerah Sebagai Ruang Transformasi?.....	74
B. <i>Policy-statement</i> Yang Tidak Mengakar.....	77
C. Ketegaran Nalar Yuridis-Adminstatif:Keleluasaan vs Kebermanfaatan.....	79
1. Era Orde Baru.....	81

2. Era Reformasi.....	91
D. Kelumpuhan Instrumen Teknokratis.....	99
D. <i>Review</i> Instrumentasi Kebijakan Lingkungan: Mendambakan Infrastruktur <i>Policy Making</i>	107
E. Refleksi: Rapuhnya Daya Kekang:Keberanian Mengatakan Tidak.	116

BAB 4 MEMPERTARUHKAN KEWENANGAN UNTUK TATA RUANG

.....	122
A. Instalasi Untuk Merajut Daya Kekang.....	122
B. Kesadaran Ekologis: Semarang Kota Rawan Bencana.....	125
C. Membangun KIC: Memapar Resiko Lingkungan?.....	132
D. Infrastruktur <i>Policy-making</i> , Penyangga Sistem Perizinan.....	148
1. Tata Ruang Di Kota Semarang: Berfungsinya Referensi Dalam Mengelola Dilema.....	149
2. Amdal Sebagai Instrumen Perizinan Untuk Pengendalian Lingkungan Hidup.....	153
E. Refleksi: Berotonomi Dengan Semangat Memagari Daya Dukung Alam?.....	156

BAB 5 MEMPERTARUHKAN KEWENANGAN UNTUK TATA RUANG

.....	159
A. Akuntabilitas Sebagai Persoalan Pertaruhan.....	160
B. Menyikapi Supremasi Nalar Yuridis-Birokratis.....	161
C. Keterhubungan: Atasan-Bawahan, Sinkronisasi Informasi Lintas Unit	167
D. Lemahnya Posisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kealpaan Memberikan Kompensasi.....	170

D. Refleksi: Supremasi Nalar <i>Compliance</i> , Kaburnya Urgensi Berinovasi.....	176	
 BAB 6 PENATAKELOLAAN INFORMASI		
UNTUK MENGGALANG REORIENTASI NILAI	180	
A. Tantangan Berotonomi Dalam Mereorientasi Prefensi Nilai.....	181	
B. Tantangan Dalam Menata Ruang: Antara Kini dan Masa Depan	189	
C. Infrastruktur Kebijakan Untuk Menjalankan Fungsi Regulasi.....	194	
D. Refleksi.....	204	
 BAB 7 PERTARUHAN SUMBER DAYA PEMERINTAH		207
A. Anggaran Untuk Menjaga Lingkungan.....	207	
B. Pajak/Retribusi: Instrumen Perizinan Sebagai Sumber Daya Untuk Mendapatkan Uang.....	209	
C. Refleksi.....	214	
 BAB 8 PERTARUHAN ORGANISASIONAL		216
A. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	216	
B. Kondisi Sumber Daya Manusia.....	220	
C. Refleksi.....	223	
 BAGIAN KEEMPAT.....		224
 BAB 9 KESAKSAMAAN (I):ADANYA WAJAH <i>POLICY-MAKING</i> DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH		225
A. Otonomi Daerah Sebagai Konteks Berkinerjanya Kebijakan Lingkungan.....	227	

B.	Berfungsinya Insfrastuktur <i>Policy-Making</i> : Catatan Dari Penataan Ruang Kota Semarang.....	230
C.	Instrumentasi untuk Perubahan Preferensi Nilai.....	238
E.	Pentingnya Kesaksamaan <i>Policy-Making</i> dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	241
BAB 10	KESAKSAMAAN (II):MEMAGARI DAYA DUKUNG ALAM, OTONOM UNTUK TIDAK OTONOM.....	246
A.	Konteks dan Substansi Kebijakan	246
B.	Berani Berkreasi untuk Memastikan Kinerja: <i>Policy Making</i> dalam Pemerintahan Berotonomi Luas dan Akuntabel.....	251
1.	Gagap Dalam Berkreasi, Tersia-siakannya Ruang Berinovasi.....	258
2.	Berotonomi Daerah Yang Juga Akuntabel Terhadap Lingkungan Hidup.....	263
C.	<i>Standing Position Inovatif</i> : Otonom Untuk Tidak Otonom...	272
Bab 11	KESIMPULAN.....	278
DAFTAR PUSTAKA.....		284
LAMPIRAN.....		298

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Instrumen Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang KPPLH	87
Tabel 3.2	Perbandingan Jumlah Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Guna Menjaga Daya Dukung Lingkungan.....	106
Tabel 3.3	Instrumen Kebijakan Daya Dukung Lingkungan Era Reformasi Berdasarkan UU No 23 Tahun 1997 & UU No 32 Tahun 2009	109
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Semarang.....	127
Tabel 4.2	Kondisi Rawan Bencana di Kota Semarang.....	130
Tabel 4.3	Daftar Industri Kota Semarang yang Terdaftar dalam HKI Indonesia.....	133
Tabel 4.4	Daftar Kawasan Industri di Kota Semarang yang Tidak Terdaftar dalam HKI Indonesia.....	133
Tabel 4.5	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014.....	134
Tabel 4.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014.....	136
Tabel 4.7	Dampak Pembangunan Kawasan Industri Candi.....	144
Tabel 5.1	Desain Tata Kewenangan Kelembagaan Tata Kelola Keruangan Kota Semarang.....	163
Tabel 5.2	Kewenangan Perizinan Penataan Ruang Menurut Pasal 125 Perda No 14 tahun 2011.....	164
Tabel 5.3	Tata Kewenangan Lembaga Perizinan Pemanfaatan Ruang dengan Atasan, Bawahan, dan Sektor Lain.....	169
Tabel 6.1	Ketentuan Daya Dukung Lingkungan dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang.....	194
Tabel 6.2	Rencana Pola Ruang Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.....	196
Tabel 6.3	Peraturan Zonasi untuk Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011.....	199
Tabel 6.4	Jenis Perizinan Kawasan Industri Candi.....	203
Tabel 7.1	Anggaran Spesifik untuk Menjaga Daya Dukung Lingkungan 2017-2021 (dalam ribuan).....	210

Tabel 7.2 Jumlah Perizinan Distaru.....	211
Tabel 7.3 Perkembangan Jumlah Izin di Kota Semarang Tahun 2011-2016.....	212
Tabel 7.4 Perkembangan Investasi Kota Semarang Tahun 2011-2016....	213
Tabel 8.1 Tujuan, Fungsi, dan Bentuk Struktur Organisasi Perizinan Ruang Kota Semarang.....	219
Tabel 8.2 Kondisi SDM pada Lembaga Perizinan Penataan Ruang Kota Semarang.....	223
Tabel 9.1 Ketidaksaksamaan Instrumentasi Tata Kewenangan (<i>Authority</i>).....	232
Tabel 9.2. Ruang Kreasi yang Belum Diisi	234

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tata Kelola Status Quo Antroposentris.....	22
Gambar 2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	57
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Semarang.....	126
Gambar 4.2 Kondisi Rawan Bencana di Kota Semarang.....	128
Gambar 4.3 Peta Pengembangan Kawasan Industri Tugu/Ngaliyan.....	138
Gambar 4.4 Interpretasi Penggunaan Lahan DAS Silandak Melalui Citra Landsat Tahun 1994 dan Citra Spot-5 Tahun 2005.....	143
Gambar 6.1 Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang.....	192
Gambar 9.1 Setting Pewacanaan Pola Ruang Kota Semarang.....	239

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	151
Bagan 6.1 Jenis-Jenis Izin Pemanfaatan Ruang.....	186